

POLICY BRIEF

Urgensi Mengintegrasikan Pengetahuan Akademis dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Rifqi Mulya Nauli Siregar

Peneliti Pusat Riset Perdamaian dan Kerjasama Selatan-Selatan, Universitas Padjadjaran

Ditujukan kepada:

1. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pendahuluan

Indonesia memiliki posisi strategis yang signifikan di Asia Tenggara, namun kualitas kebijakan luar negeri tidak hanya dipertimbangkan dengan asumsi yang kurang memadai melalui pengalaman praktik para diplomat, melainkan juga oleh basis pengetahuan yang menopang setiap kebijakan. Dalam hal ini, terlihat celah dimana hasil riset dari akademisi dan lembaga *think-tanks* yang berpotensi memperkuat kedalaman analisis kebijakan luar negeri Indonesia masih belum terserap secara optimal ke dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Sementara di dalam negeri pada era Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, pernah terdapat forum *foreign policy breakfast* yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan input mengenai kebijakan luar negeri (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008). Saat ini, mekanisme serupa belum ditemukan di Kemlu RI.

George (1993) mengidentifikasi tiga basis pengetahuan dalam kesenjangan antara teori dan praktik dalam kebijakan luar negeri: konseptualisasi strategi, pengetahuan lintas-aktor, dan pemahaman perilaku aktor sasaran. Ketiga basis ini mengalami kesenjangan sistematis dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya pada kasus krisis Myanmar (Siregar et al., 2025b, 2025a), yang diperparah oleh lemahnya mekanisme komunikasi antara domain akademis dan Kemlu RI.

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan luar negeri yang efektif membutuhkan pertimbangan lebih dari sekadar pengalaman para diplomat dalam praktik diplomasi. Kebijakan luar negeri memerlukan basis pengetahuan yang terstruktur dan berkelanjutan. Saat ini, hasil riset dari lembaga *think-tank*, akademisi, dan pusat riset universitas masih jarang di terserap secara sistematis ke dalam proses perumusan kebijakan di Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI). Proses yang ada saat ini bersifat informal, parsial, dan terputus setiap kali terjadi rotasi staf.

Policy brief ini merekomendasikan dua langkah prioritas bagi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN): pertama, membuka posisi *pracademics* di level staf ahli dan menunjuk akademisi sebagai konsultan kebijakan berbasis kepakaran isu; kedua, membangun forum konsultasi reguler antara Kemlu RI dan komunitas riset yang terinstitusionalisasi di bawah koordinasi BSKLN.



Permasalahan

Berdasarkan riset menggunakan pendekatan kualitatif terhadap informan dari lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS Indonesia) dan Kemlu RI Siregar et al. (2025a) menemukan lima tantangan struktural:

Pertama, domain akademis menghasilkan kerangka analisis berbasis riset berjangka panjang, sementara Kemlu RI beroperasi dalam kerangka diplomasi formal yang dilandasi preseden dan norma. Rekomendasi akademis kerap dipersepsikan terlalu idealis dan utopis karena tidak mempertimbangkan tekanan tenggat waktu yang dibutuhkan pembuat kebijakan.

Kedua, akademisi membangun pengetahuan komparatif lintas negara dan periode, sementara diplomat membutuhkan solusi kontekstual yang cepat. Haukkala (2011) menyebut ini sebagai ketidakcocokan ritme dimana riset bergerak dalam hitungan bulan, kebijakan dalam hitungan hari.

Ketiga, rotasi staf yang terjadi cukup cepat di Kemlu RI memutus jaringan relasional yang sudah terbangun antara diplomat dan akademisi. Tidak ada protokol yang mewajibkan transfer pengetahuan sebelum seorang staf dipindahtugaskan, sehingga hubungan yang telah dibangun harus dimulai kembali dan bergantung pada database yang dimiliki BSKLN (Siregar et al., 2025a).

Keempat, tidak ada forum konsultasi resmi dan reguler antara Kemlu RI dan komunitas riset. Seleksi pengetahuan akademis bergantung pada preferensi personal pejabat yang berdasarkan pengalaman diplomat. Kondisi ini membuat rekomendasi akademis tidak terserap karena ketiadaan mekanisme untuk berkonsultasi (Walt, 2005).

Kelima, kapasitas BSKLN sebagai unit yang seharusnya menjadi jembatan antara kedua domain masih terbatas, baik dari sisi SDM maupun anggaran, sehingga belum dapat menjalankan fungsi ini secara optimal (Siregar et al., 2025a).

Alternatif Solusi

Guna menjawab kelima tantangan di atas, beberapa alternatif dapat dipertimbangkan.

Pertama, penguatan SDM dan alokasi anggaran BSKLN agar mampu menjalankan fungsi jembatan antara domain teoritis dan praktis secara optimal.

Kedua, formalisasi forum dialog reguler antara pembuat kebijakan dan akademisi dengan agenda berbasis isu kebijakan prioritas.

Ketiga, penunjukan akademisi atau lembaga riset sebagai konsultan kebijakan berdasarkan kepakaran isu prioritas yang relevan dengan kepentingan nasional.

Keempat, pembukaan posisi *pracademics* (*practitioner-academics*) pada level staf ahli Kemlu RI yang relevan dengan kebutuhan kebijakan (Murphy & Fulda, 2011).



Tabel 1. Matriks Evaluasi Alternatif Solusi

Alternatif	Efektivitas	Kelayakan Politik	Biaya	Keberlanjutan
Penguatan SDM & Anggaran BSKLN	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Forum Dialog	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
Konsultan berbasis kepakaran	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
Pracademics sebagai ataf ahli	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Rekomendasi

Dari sisi institusi, Kemlu RI perlu memperkuat kapasitas BSKLN sebagai jembatan antar domain teoritis dan praktis, sekaligus membuka akses bagi *pracademics* pada posisi staf ahli. Kehadiran *pracademics* memungkinkan masuknya kultur kebijakan berbasis bukti secara organik tanpa perombakan birokrasi.

Sementara itu, dari sisi proses perumusan kebijakan, Kemlu RI perlu membangun sistem manajemen pengetahuan di bawah koordinasi BSKLN yang mencakup: 1) formalisasi forum konsultasi reguler antara komunitas riset dan pembuat kebijakan; 2) penetapan prosedur konsultasi akademis sebelum merumuskan kebijakan; dan 3) protokol pendokumentasian pengetahuan sebelum merotasi staf.

Resistensi yang mungkin dihadapi mencakup: 1) kekhawatiran terhadap objektivitas konsultan; 2) penyesuaian kultur birokrasi diplomatik terhadap masukan eksternal; dan potensi perbedaan antara rekomendasi berbasis bukti dan tekanan politik-diplomatik. Hal ini dapat di mitigasi melalui: 1) penetapan kode etik terhadap konsultan; 2) seleksi konsultan berbasis kepakaran; dan 3) mekanisme evaluasi berkala oleh BSKLN.



Tabel 2. Peta Jalan Implementasi

Tahapan	Langkah Konkret	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
Jangka Pendek (6 bulan)	- Pengadaan forum konsultasi kebijakan secara berkala - Penunjukan koordinator input akademik di BSKLN	- Biro Perencanaan dan Organisasi - BSKLN	Forum konsultasi kebijakan
Jangka Menengah (6-18 bulan)	- Penetapan mekanisme penunjukan konsultan kebijakan - Penetapan mekanisme transfer pengetahuan sebelum rotasi staf	- BSKLN - Biro Sumber Daya Manusia - Biro Hukum	- Berjalannya mekanisme seleksi konsultan - Terbentuknya protokol transfer pengetahuan sebelum rotasi staf
Jangka Panjang (>18 bulan)	- Merekrut <i>pracademics</i> pada posisi staf ahli - Penunjukan lembaga riset sebagai konsultan tetap kebijakan berbasis kebutuhan isu	- BSKLN - Biro Sumber Daya Manusia - Biro Hukum	- Penunjukan <i>pracademics</i> sebagai staf ahli - Penunjukan mitra konsultan kebijakan berbasis kepakaran dan isu prioritas kepentingan nasional

POLICY BRIEF

Urgensi Mengintegrasikan Pengetahuan Akademis dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Daftar Pustaka

- George, A. L. (1993). Bridging The Gap: Theory and Practice in Foreign Policy. United States Institute of Peace Press.
- Haukkala, H. (2011). The Time, Space and Strategies for Scholarly Analysis in Foreign Policy Making. In The Academia and Foreign Policy Making: Bridging the Gap (pp. 21–32). Danish Institute for International Studies.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). Foreign Policy Breakfast, Di Gedung Pancasila, Deplu, Jakarta, 19 AGUSTUS 2008. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/foreign_policy_breakfast_di_gedung_pancasila_deplu_jakarta_19_agustus_2008
- Murphy, A. M., & Fulda, A. (2011). Bridging The Gap: Pracademics in Foreign Policy. PS - Political Science and Politics, 2. <https://doi.org/10.1017/S1049096511000084>
- Siregar, R. M. N., Bainus, A., & Darmawan, W. B. (2025a). Bridging The Gap Between Theory and Practice in Foreign Policy on Myanmar Crisis: Voices from Policymakers. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 28–42. <https://doi.org/10.15408/jisi.v6i2.46309>
- Siregar, R. M. N., Bainus, A., & Darmawan, W. B. (2025b). Governance Challenges in Bridging Theory and Practice: Indonesian Foreign Policy. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 7(1), 147–161.
- Walt, S. (2005). The Relationship Between Theory and Policy in International Relations. Annual Review of Political Science, 8(1), 23–48. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.7.012003.104904>



Contact Information

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Rifqi Mulya Nauli Siregar

+62 81375015960

rifqimulyan.siregar@gmail.com